



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Rabu, 1 September 2021
Edisi : 0022.6432/GBP/IX/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ipp@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 1 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Harga Jagung di Gorontalo Naik & Bahan Pakan Ternak (ID&K)..... 1
2. PERKEBUNAN :
 - Bisnis Sawit Jadi Masalah Di Papua (RM)..... 2
3. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Gobel: Bangun Ekosistem untuk Petani Milenial (ID)..... 3-4
 - Sistem Resi Gudang sebagai Sumber Pembiayaan Petani (SI)..... 19-20
4. LITBANG PERTANIAN :
 - Inovasi Pertanian di Persimpangan (R)..... 15-16
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Anak Usaha RNI Distribusikan Beras Premium (ID)..... 5
 - Warung Pangan Terus Pasarkan Produk BUMN (R)..... 6
 - Buwas Mentahkan Isu Impor (RM)..... 7-8
 - Jangan Kerdilkan Badan Pangan (K)..... 17-18
6. PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN :
 - Anak Muda di Antara Lumpur dan Keringat (MI)..... 14
7. PERTANIAN UMUM :
 - Pertanian Solusi Orang Terdampak PHK (SI)..... 9
 - Inflasi Mini Akibat Daya Beli Kian Lesu (KN)..... 10
 - Pungutan PPN Bahan Pokok Batal (BI)..... 11-13

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUMBER

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

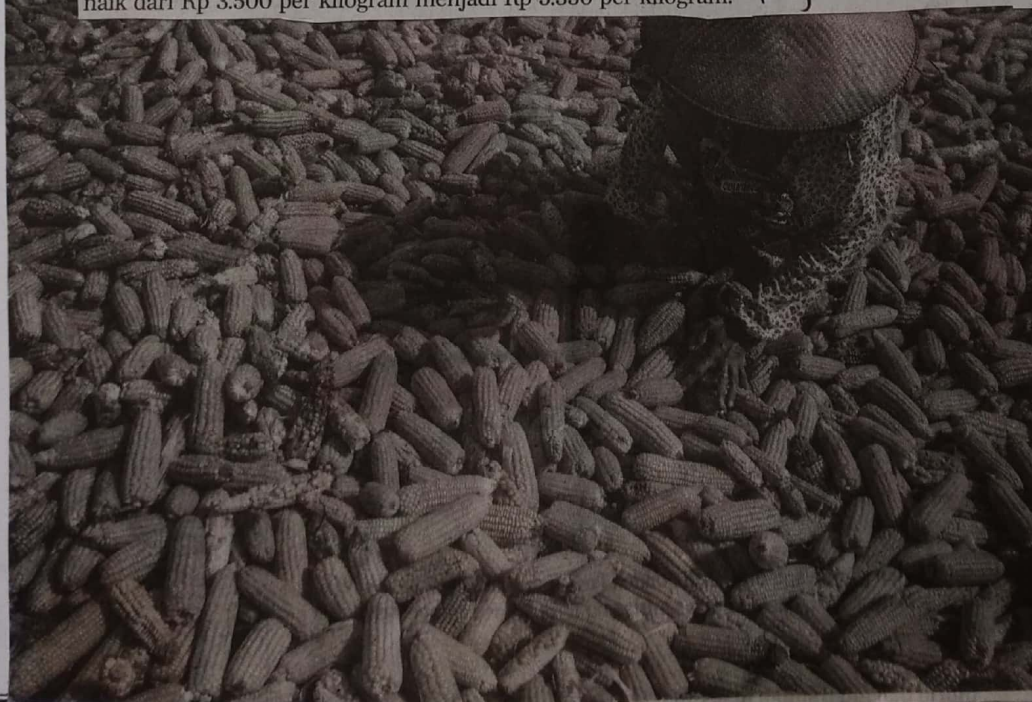
- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 11/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Jagung di Gorontalo Naik



ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

Seorang petani mengumpulkan jagung yang baru saja dipanen di Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (31/8/2021). Harga jagung kering di tingkat petani di Gorontalo naik dari Rp 3.500 per kilogram menjadi Rp 5.350 per kilogram. K-9



Bahan Pakan Ternak

Petani menjemur jagung di Desa Pandere, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (30/8/2021). Harga jagung untuk bahan pakan ternak di tingkat petani naik dari rata-rata Rp 2.500 menjadi Rp 4.700 per kilogram karena kurangnya persediaan akibat hujan yang terus mengguyur wilayah itu. 10-11

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bupati Sorong Digugat Bisnis Sawit Jadi Masalah Di Papua

KELAPA sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan dan sekaligus menyumbang devisa terbesar bagi negara kita. Hal ini kemudian memicu perluasan lahan sawit. Pada tahun 1980 hanya 295 ribu hektare, di tahun 2019 luas kebun sawit sudah mencapai 16,38 juta hektare.

Anggota DPD Filep Wamafma mengatakan, habisnya kavling tanah di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan perusahaan perkebunan swasta mulai mendatangi bumi Papua di era 1990-an. Namun, berbagai persoalan muncul seiring investasi dan pembukaan lahan itu.

Dia lalu menyoroti kasus Bupati Sorong, Johnny Kamuru yang digugat oleh tiga perusahaan sawit setelah izin operasinya dicabut.

Bagi Filep, langkah Bupati Sorong tersebut merupakan kebijakan yang patut didukung karena mewakili kepentingan masyarakat. Tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk takut dan mundur dalam menghadapi gugatan para pelaku usaha sawit tersebut.

"Saya menyatakan dukungan

sepenuhnya kepada Pak Bupati. Kita patut apresiasi ketegasan dan keberanian beliau karena ini sudah masuk melawan mafia. Mereka berani selewengkan izin, bahkan digadaikan. Itu kan orang sudah niat buruk sejak awal," sambung Wakil Ketua I Komite I DPD ini.

Johnny Kamuru digugat setelah mencabut izin operasi empat perusahaan sawit. Keempat perusahaan yang izinnya dicabut itu, yakni PT Cipta Papua Plantation yang berlokasi di Distrik Mariat dan Sayosa dengan lahan seluas 15.671 hektare. PT Papua Lestari Abadi yang berlokasi di Distrik Segun dengan luas lahan 15.631 hektare.

Kemudian, PT Sorong Agro Sawitindo yang berlokasi di Distrik Segun, Klawak dan Klamono dengan luas lahan 40.000 hektare. Serta, PT Inti Kebun Lestari yang berlokasi di Distrik Salawati, Klamono dan Segun dengan luas lahan 34.400 hektare.

Filep menilai, saat ini sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia bahkan di Papua dikuasai oleh para taipan. Tentu, bukan perkara mudah menghadapi para pengusaha sawit ini

apalagi jika sampai berurusan dengan para mafia.

Apalagi kasus gugatan terhadap bupati Sorong ditengarai merupakan potongan *puzzle* kejahatan terstruktur dan sistematis.

"Rasanya tidak mungkin mereka sangat berani melakukan penyimpangan jika tidak ada yang melindungi dibalik mereka," curiga dia.

Karena itu, Filep berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat juga turut memberikan advokasi kepada Bupati Sorong dalam melawan ketiga perusahaan yang melayangkan gugatan.

Dia pun mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk menjalin kekuatan sebagai bentuk solidaritas dalam melawan ketidakadilan yang makin hari terus dipertontonkan di Tanah Papua. **IRM-7**

"Bagaimana pun, ini bukan cuma persoalan Kabupaten Sorong, tapi lebih luas Provinsi Papua Barat, khususnya biro hukum dan dinas kehutanan. Ini soal hak masyarakat adat yang hidup di wilayah adat tersebut. Jangan kita biarkan Bupati melawan sendirian," tegasnya. ■ **KAL**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Gobel: Bangun Ekosistem untuk Petani Milenial

Oleh **Ridho Syukra**

17.11

► **JAKARTA** – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan agar para pemangku kebijakan membangun ekosistem pertanian yang mampu mendorong para milenial tertarik menjadi petani. Ekosistem pertanian harus dibangun sedemikian rupa sehingga terintegrasi dari hulu hingga hilir, antara lain mencakup aspek permodalan, inovasi teknologi, dan diversifikasi.



Rachmat Gobel

menjadi lumbung pangan dunia. "Pemikiran strategis seperti itu penting untuk dipahami para kaum milenial," jelas Gobel dalam keterangannya.

Dari kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, Gobel mendapati petani muda sebenarnya sangat bersemangat bertani. Hanya saja, petani dihimpit masalah rutin, seperti saat tanam sulit mendapat pupuk dan bibit dan saat panen harga jatuh. Hal-hal inilah yang membuat petani harus menghadapi hal-hal di luar masalah bercocok tanam. "Semua itu di luar kendali petani. Saya mengusulkan penguatan kelembagaan petani seperti koperasi untuk mengatasi ini," jelas dia.

Petani juga menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan teknologi pertanian, seperti traktor dan mesin pengering gabah. Petani RI umumnya masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern. "Produktivitas komoditas juga masih rendah. Ini

yang membuat pertanian tidak atraktif secara ekonomi," ujar dia. Karena itu, Gobel menyarankan agar selalu ada inovasi untuk meningkatkan kualitas bibit, pupuk, dan peralatan pertanian.

Gobel bercerita tentang pengalamannya dalam uji coba demplot pertanian padi dengan pupuk nonsubsidi sebagai salah satu meningkatkan produktivitas pertanian. "Memang harga pupuknya lebih mahal, tapi hasilnya meningkat dua kali lipat dan keuntungan petani juga naik berlipat. Apalagi jika gabah hasil panen langsung masuk mesin pengering maka kualitas beras menjadi premium dan potensi kehilangan menjadi zero," kata Gobel.

Hal yang tak kalah penting, kata Gobel, adalah diversifikasi produk hilir pertanian. "Jangan hanya menyentuh sisi hulu, tapi juga harus ada inovasi di hilir. Agar ada nilai tambah," katanya. Sebagai contoh, Gobel menyebutkan diversifikasi produk yang berbahan baku dari beras.

Profesi Menjanjikan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar petani menjadi profesi yang menjanjikan dan dapat meningkatkan

Demikian disampaikan Gobel dalam seminar daring bertema Jadi Petani Milenial, Kenapa Tidak?, Selasa (31/8), yang juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wadirut Bank BNI Adi Sulistyowati, dan Guru Besar IPB University Hermanto Siregar. Seminar tersebut dilatari oleh terus berkurangnya jumlah petani berusia muda dan menuanya usia para petani di Tanah Air. Karena itulah, Gobel mengajak kaum milenial untuk terjun menjadi petani.

Menurut Gobel, agar kaum milenial mau menjadi petani maka harus ada solusi terintegrasi dan tidak bisa sepotong-sepotong. "Jadi, harus membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, dari soal modal dan inovasi teknologi hingga soal diversifikasi produk

hilir pertanian. Ajak mereka (milenial) dengan perspektif masa depan sambil menjadikan dunia pertanian menarik untuk ditekuni sebagai profesi yang atraktif," papar Rachmat Gobel.

Pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, sehingga pertanian menjadi sektor strategis yang harus dijaga. Selain karena menyerap banyak tenaga kerja, pertanian dan para petani juga merupakan penjaga harkat dan martabat bangsa. "Bahkan di tengah pandemi ini, petani tetap memberi makan kita sebagai bangsa sehingga tidak mengemis ke bangsa lain," kata Gobel.

Di sisi lain, akibat perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk global, masa depan dunia bisa terancam oleh krisis pangan. Untuk itu, ungkap Gobel, Indonesia yang memiliki lahan nan luas dan subur harus

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

kesejahteraan sehingga sektor pertanian dapat menarik partisipasi para generasi muda. "Saat ini, total petani Indonesia sebanyak 71% berusia 45 tahun ke atas sedangkan yang di bawah 45 tahun sebanyak 29%," kata Presiden Jokowi. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menggenjot realisasi target 2,50 juta petani milenial hingga 2024 dengan kategori usia rata-rata di bawah 40 tahun.

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi mengajak kaum milenial tidak ragu menjadi petani dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan sistem pertanian modern. Stigma petani, yang identik dengan pekerjaan yang harus berkotor-kotor di ladang dan profesi yang rendah tidak ada lagi. Petani modern saat ini sudah banyak, mereka menggunakan teknologi dan inovasi dalam sistem pertaniannya guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. (dl)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Anak Usaha RNI Distribusikan Beras Premium

JAKARTA – Anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Persero) yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan, PT Rajawali Nusindo, siap mendistribusikan produk Rania Beras Premium untuk mendukung pembentukan *holding* BUMN klaster pangan yang diketuai RNI. Pada tahap awal, beras premium Rania siap didistribusikan melalui 18 cabang Rajawali Nusindo di seluruh Pulau Jawa.

Direktur Rajawali Nusindo Iskak Putra mengatakan, saat ini Rania Beras Premium tersedia dalam kemasan 5 kilogram (kg) dan ke depan akan memiliki beberapa ukuran, sedangkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan sesuai Permendag No 57 Tahun 2017, untuk Pulau Jawa saat ini dikenai harga Rp 12.800 per kg. Untuk rencana wilayah distribusi tahap selanjutnya akan dipasarkan di seluruh Indone-

sia melalui 43 cabang Rajawali Nusindo,” ujar Iskak saat *soft launching* produk Rania Beras Premium, baru-baru ini.

Beras premium itu akan dipasok melalui 13 titik RMU (Rice Milling Unit) milik PT Pertani (Persero). Beras premium Rania akan dapat ditemukan di pasar tradisional di tingkat grosir, semigrosir, dan ritel, pasar modern, dan *e-commerce*. “Sebagai salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia, kami akan selalu mengedepankan kualitas dan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi para *stakeholder* kami,” kata Iskak. (D-1)

Untuk tahap awal, salah satu program sinergi serta membangun *brand awareness* di lingkungan internal, Rajawali Nusindo siap membuka diri untuk melaksanakan program paket natura berkualitas yang terdiri atas Rania Beras Premium dan Raja Gula. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

GURU

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Warung Pangan Terus Pasarkan Produk BUMN

■ MUHAMMAD NURSAMS

JAKARTA — Kluster Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan mendukung pengembangan aplikasi Warung Pangan (WP) milik PT Banda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI selaku calon induk *holding* BUMN pangan mengapresiasi aplikasi WP yang telah merangkul 44-510 mitra di tujuh kota sejak diluncurkan pada Agustus 2020. 12.16

Direktur Komersial RNI Frans Marganda Tambunan mengatakan, pengembangan sebuah aplikasi dalam satu tahun

pertama tentu tidak mudah. Namun, BGR Logistics mampu menunjukkan pencapaian luar biasa. Frans memuji inovasi BGR Logistics yang mampu beradaptasi dengan pemanfaatan digitalisasi pada era disrupsi saat ini.

Frans menyebutkan, kehadiran aplikasi WP sangat tepat dalam masa pandemi yang mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan beralih profesi dengan berwirausaha.

"Dampak pandemi juga memukul para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran aplikasi WP sangat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan bahan pa-

ngan dengan harga terjangkau," kata Frans saat gelar wicara bertajuk "Warung Pangan, Sahabat Usaha Pangan untuk Negeri" di Jakarta, Selasa (31/8).

Frans mengatakan, aplikasi WP merupakan salah satu upaya kluster BUMN pangan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kualitas, keterjangkauan pangan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Frans, akses pasar masih menjadi persoalan klasik dalam sektor pertanian. Frans menilai, aplikasi WP mampu menjadi jawaban dalam menyerap hasil pertanian.

Menurut Frans, aplikasi WP juga melengkapi sinergi hulu hingga hilir

kluster pangan yang terdiri atas RNI, BGR Logistics, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Perikanan Indonesia, Perikanan Nusantara, Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Garam, dan PT Berdikari.

Frans menilai, sinergitas kluster BUMN pangan dapat mendorong akselerasi Warung Pangan, baik dari sisi modalan maupun distribusi bahan pangan. Ia mengatakan, kluster BUMN pangan memiliki PPI, Sang Hyang Seri, Pertani, dan anak usaha RNI, PT Rajawali Nusindo, yang memiliki kantor cabang hampir di seluruh Indonesia.

Frans meyakini akselerasi Warung

Pangan bisa semakin masif dan menjangkau lebih banyak kota di Indonesia. Saat ini, ia mengatakan, Warung Pangan baru tersedia di tujuh kota, yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, dan Pangkalpinang.

Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo mengatakan, BGR Logistics memosisikan diri sebagai *digital logistics company* dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan dengan transformasi digital. Termasuk juga pada proses administrasi, sistem kepegawaian, dan sistem keuangan perusahaan.

■ ed: citra listya rini

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

- ☐ Tanaman Pangan
☐ Hortikultura
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan
☐ Perkebunan
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian

- ☐ Litbang Pertanian
☒ Ketahanan Pangan
☐ Karantina Pertanian
☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Pertanian Umum

MEDIA

- ☐ Agro Indonesia
☐ Bisnis Indonesia
☐ Indo Pos
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
☐ Kompas
☐ Kontan

- ☐ Koran Jakarta
☐ Koran Tempo
☐ Majalah Tempo
☐ Media Indonesia
☐ Pelita
☒ Rakyat Merdeka
☐ Republika

- ☐ Seputar Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Sinar Tani
☐ Suara Karya
☐ Suara Pembaruan
☐ The Jakarta Post

- TANGGAL 1/9/2021
 HALAMAN 10 / 1
 RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur

Bulog Punya Stok Beras Melimpah

Buwas Mentahkan Isu Impor

Perum Bulog menepis kabar melakukan impor beras pada semester I-2021. Perusahaan pelat merah itu mengaku masih memiliki stok berlimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

DALAM Rapat Dengan Pendapat (RDP) Senin (30/8), Sejumlah anggota Komisi IV DPR menanyakan kepada jajaran petinggi Bulog terkait impor beras yang terjadi selama Semester I-2021. Para politisi Senayan mempertanyakan klaim Bulog yang selalu menegaskan bahawa stok beras dalam negeri sangat mencukupi.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso langsung menepis isu impor beras. RM.10

Buwas-sapaan akrab Budi Waseso, menerangkan, hingga 27 Agustus 2021, Bulog memiliki stok beras di dalam gudang mencapai 1,16 juta ton. Itu terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1,1 juta ton dan beras komersial 14 ribu ton.

"Stok beras ini masih mencukupi kebutuhan penjualan dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Kami pastikan impor beras bukan dari Bulog," tegas Buwas.

Menurut Buwas, kalau ada impor beras, mungkin untuk jenis beras khusus. Dan, bukan Bulog yang melakukannya. "Sampai detik ini Bulog belum mendapat penugasan untuk melaksanakan impor beras," ungkapnya.

Ia menerangkan, impor beras khusus bisa dilakukan instansi atau perusahaan yang menerima surat persetujuan impor. Sedangkan Bulog tidak bisa. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Bulog hanya diperkenankan impor untuk keperluan umum, hibah dan lainnya.

"Impor untuk keperluan umum dan hibah hanya bisa dilakukan oleh BUMN pangan, dalam hal ini Perum Bulog. Yakni untuk jenis beras dengan tingkat kepecahan di atas 5 persen sampai 25 persen dengan kode HS 10063099," terangnya.

Untuk tahun depan, lanjut



Budi Waseso

Buwas, Bulog tengah mempersiapkan untuk penyaluran beras sebanyak 1,21 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 865 ribu ton berasal dari CBP, baik melalui skema Berencana atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Sementara sebanyak 100 ribu ton berasal dari Golongan Anggaran (Golang), dan 250 ribu ton merupakan beras bantuan pemerintah lainnya.

"Untuk pengadaan di 2022, kami memastikan Bulog tidak akan melakukan impor beras. Ini terlihat dari tidak adanya rencana pengadaan beras luar negeri," ungkapnya.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

TEMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Menurut hitungannya, pengadaaan beras dalam negeri tahun depan sebanyak 1,25 juta ton. Secara estimasi, pada 2022 Bulog akan melakukan persediaan awal 1.005.075 ton beras, dengan persediaan akhir nantinya tersisa 1.039.075 ton.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, stok beras impor 2018 yang belum disalurkan tercatat berjumlah 186.952 ton per Agustus. Lebih rendah dibandingkan dengan stok per Maret sekitar 250 ribu ton.

Menurut Khudori, besarnya volume stok beras sisa impor 2018 itu harus dijadikan peringatan bagi Pemerintah untuk menyiapkan kebijakan stok pangan yang lebih tepat.

Sebab, beras impor berusia lebih dari tiga tahun berisiko mengalami penurunan mutu dan rusak.

"Sebaiknya, penugasan berupa penyerapan domestik maupun impor dalam jumlah besar harus diikuti dengan kanal penyaluran yang pasti," tutur Khudori dalam keterangannya, kemarin.

Sebab, ingatnya, pengelolaan cadangan beras yang runyam, akan membebani kinerja Bulog pada akhirnya.

Importasi beras mengemuka dalam RDP dengan Bulog, Senin (30/8). Ketua Komisi IV DPR Sudin menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat impor 41.600 ton beras sepanjang Januari-Juli 2021 dengan nilai ditaksir mencapai 18,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 263,86 miliar. Beras tersebut dipasok dari Vietnam dan Thailand.

"Impor tersebut dilakukan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian," ungkap politisi PDI-P ini.

Setelah mendapatkan penjelasan Bulog, Komisi IV menyatakan dukungannya kepada perusahaan untuk tidak melakukan importasi beras. Komisi IV juga meminta kepada Pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog melepas sebagian stok CBP, agar Perum Bulog dapat melakukan penyerapan gabah beras petani pada saat panen kedua 2021. ■ DWI

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL | 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 12/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pertanian Solusi Orang Terdampak PHK

JAKARTA – Guru Besar IPB Prof Hermanto Siregar mengatakan sektor pertanian merupakan penyelamat bagi jutaan orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Apalagi, menurut dia, angka pengangguran hingga 2021 ini kurang lebih mencapai 11,4%.

"Karenaitu, pertanian adalah sumber pekerjaan yang dominan dan angkanya selama pandemi mencapai 30%," ujar Hermanto dalam sesi diskusi webinar berjudul "Jadi Petani Milenial, Kenapa Tidak" kemarin.

Berkaitan dengan hal ini, Hermanto mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pengelolaan petani muda perlu didorong secara serius. Terutama dalam menghadapi gelombang petani tua yang semakin menurun. "Yang mau saya tekankan pada SDM pertanian itu adalah menghadapi beberapa kritikal. Yang paling utama adalah usia petani yang semakin tua. Dan, ini masalah buat kita," katanya.

Hermanto mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan pelatihan 1 juta petani milenial. Bahkan dia mengapresiasi ruang pusat data Agriculture War Room (AWR) yang mampu menjangkau persoalan pertanian di lapangan.

"Kostra Tani sangat ba-

gus karena pendekatannya semua ini bisa terjangkau. Termasuk dengan kampus, pemasaran hasil pertanian, bahkan perlindungan hak petani. Saya kira ini luar biasa," katanya.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan, salah satu fokus utama Kementan saat ini adalah mengisi semua peluang yang ada. Di antaranya menyiapkan SDM pertanian untuk mengakselerasi ekspor produk olahan.

"Kami akan fokus mengisi semua peluangnya. Terlebih peluang bisnis di subsektor hortikultura yang sangat digemari anak muda karena akses pasarnya terbuka lebar dan untungnya jelas. Hilirisasi ini sangat penting, karena itu diperlukan tenaga muda atau petani milenial," katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menambahkan, SDM pertanian selama ini adalah harapan bangkitnya pertanian Indonesia dan berkontribusi dalam modernisasi pertanian Indonesia di era digital saat ini. Regenerasi yang terus berjalan juga memastikan pertanian nasional terus menyediakan kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia.

■ **sudarsono** 51.17

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ PROYEKSI INFLASI

Inflasi Mini Akibat Daya Beli Kian Lesu

JAKARTA. Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus 2021 akan mencatatkan inflasi rendah. Hal tersebut, sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat berlanjutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi Agustus sebesar 0,01%. Proyeksi tersebut berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) pada pekan keempat Agustus. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Agustus 2021 secara tahunan kalender sebesar 0,82% dan secara tahunan sebesar 1,57%.

Secara terperinci, penyumbang utama inflasi Agustus, yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,03%, tomat naik 0,02%, telur ayam ras dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01%.

Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, antara lain cabai rawit sebesar 0,05%, cabai merah turun 0,03%, serta kangkung, bayam, sawi hijau, kacang panjang, bawang merah, jeruk, emas perhiasan dan angkutan antarkota yang

masing-masing turun 0,01%.

Sejalan dengan BI, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan inflasi Agustus 2021 sebesar 0,01%. Utamanya, didorong oleh adanya penurunan harga pada komponen barang bergejolak yang diperkirakan deflasi 0,53%.

"Penurunan harga komoditas pangan berkaitan dengan panen raya di bulan Agustus

Harga minyak goreng, tomat, telur, daging ayam dan rokok naik tipis.

2021," kata Josua.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman meramal, inflasi pada bulan Agustus 2021 sebesar 0,03%, lebih rendah dari 0,08% pada bulan Juli. Namun, secara tahunan, inflasi Agustus diperkirakan sebesar 1,60% *year on year* (yoy), lebih tinggi dari 1,52% yoy pada bulan sebelumnya.

Rendahnya pergerakan inflasi dipengaruhi oleh penuru-



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi Agustus sebesar 0,01%.

nan inflasi inti. "Adanya PPKM Level 3 dan 4 serta penurunan harga emas memengaruhi tingkat inflasi inti," kata Faisal kepada KONTAN, Senin (30/8).

Ada juga penurunan dari tarif barang dan jasa sektor kesehatan, karena mulai ada normalisasi harga setelah ada *panic buying* pada awal penerapan PPKM.

Peneliti Senior Danareksa

Research Institute (DRI) Muhammad Ikbal Iskandar menambahkan, selain inflasi inti, melemahnya daya beli masyarakat juga tercermin dari penjualan ritel yang kembali ke zona kontraksi pada bulan Agustus 2021. Namun, daya beli mampu ditahan oleh program jaring pengaman sosial pemerintah.

IAN 2

Bidara Deo Pink

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Kelangkaan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 11/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PUNGUTAN PPN BAHAN POKOK BATAL

Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com

Bisnis, JAKARTA — Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perubahan skema pungutan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini dilandasi oleh desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan besarnya konsumsi untuk barang tersebut.

Dengan demikian, kebutuhan pokok tetap menjadi barang kena pajak (BKP) tetapi mendapatkan fasilitas dalam bentuk tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Hal ini berbeda dibandingkan dengan usulan sebelumnya, yaitu BKP atau jasa kena pajak (JKP) yang termasuk kebutuhan dasar tetap dikenakan tarif sebesar 5% atau 7%, lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum.

Adapun, besaran tarif umum dalam skema PPN multitarif usulan pemerintah adalah sebesar 12%. (Lihat infografik).

"Sembako [bahan pokok] yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat banyak justru akan kita fasilitasi [dengan] PPN tidak dipungut," kata Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, akhir pekan lalu.

Yoga menambahkan, kebijakan

serupa juga berlaku terhadap jasa sektor pendidikan. **8/11**

Adapun, untuk jasa kesehatan, pungutan PPN hanya dikenakan terhadap fasilitas medis yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pendidikan yang sifatnya dasar, jasa, dan pangan dasar tidak akan dikenakan PPN. [Ini dilakukan karena] kami mendengarkan suara masyarakat," tegasnya.

Di sisi lain, Yoga menjelaskan bahwa dasar dari diadakannya hampir seluruh jenis barang dan jasa sebagai BKP dan JPK karena C-Efficiency PPN di Tanah Air yang masih rendah yakni hanya 63,58%.

Artinya, pemerintah hanya bisa memungut 63,58% dari total potensi PPN yang bisa ditarik di dalam negeri.

Rencana pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah

“

Sembako [bahan pokok] yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat banyak justru akan kita fasilitasi [dengan] PPN tidak dipungut.

menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Kesebelas jenis bahan pokok tersebut meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Pasal 4A ini sempat menjadi polemik karena dianggap multitafsir yang dapat membuka peluang pengenaan PPN terhadap barang bahan pokok di luar 11 jenis barang yang disebutkan dalam penjelasan UU tersebut.

Atas dasar itu, pada 2016 perwakilan konsumen dan pedagang komoditas pa-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

TOPIC

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ngan pasar tradisional meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi atas penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42/2009.

Pada 2017, MK kemudian mengabulkan permohonan dengan menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009 tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Alhasil, dalam putusan No.39/PUU-XIV/2016, MK menyatakan barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Dengan demikian, barang kebutuhan pokok tidak terbatas pada 11 jenis saja.

KURANG PROGRESIF

Sementara itu, Lead Adviser Prospera Rubino

Sugana mengatakan, pungutan atas bahan pokok akan membebani pengeluaran kelompok miskin lebih besar dibandingkan dengan kelompok kaya, dan menyebabkan sistem PPN menjadi kurang progresif.

Pasalnya, kelompok masyarakat paling miskin menghabiskan hampir 60% dari pendapatan per kapita mereka untuk mengonsumsi makanan.

Sementara itu, kelompok masyarakat paling kaya hanya menghabiskan 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan atau pangan.

"Mengenakan pajak pada bahan makanan yang tidak diolah [yang saat ini dikecualikan], bahkan

dengan tarif rendah sekalipun, akan membebani pengeluaran kelompok miskin lebih besar dibandingkan dengan kelompok kaya," jelasnya.

Selain itu, Rubino menilai dampak terhadap kenaikan kemiskinan dari pengenaan skema multitarif juga akan lebih besar dibandingkan dengan tarif tunggal dan membebaskan bahan makanan yang belum diolah.

Menurutnya, perluasan basis pajak PPN seper-

ti yang diusulkan dalam RUU KUP dengan struktur tarif PPN tunggal 10% atau 12% dan mengecualikan bahan pokok dapat meningkatkan penerimaan lebih besar dan lebih adil.

Pengenaan tarif tunggal tersebut juga memiliki dampak yang lebih kecil terhadap peningkatan kemiskinan masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan struktur PPN multitarif. 

SKEMA PUNGUTAN

Pemerintah akhirnya merilis skema pungutan terkait dengan PPN dalam RUU KUP. Dalam rancangan yang disusun, otoritas fiskal akan memasukkan bahan pokok sebagai barang kena pajak yang tidak dipungut PPN.



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUMBER

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Skema Pengenaan PPN

Ketentuan Saat ini *Single rate*: 10%

Usulan Pengaturan:

General rate: 12%

- Tarif umum menjadi 12%:
- Kompensasi penurunan penerimaan PPh Badan karena penurunan tarif PPh badan.
- Tarif relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara OECD (19%) dan negara BRICS (17%).

Higher rate: 15%-25%

- Barang yang tergolong mewah/sangat mewah dikenai tarif 15%-25% untuk memberikan keadilan dan biasanya dikonsumsi oleh orang kaya. Contoh:
- Rumah, apartemen mewah.
- Pesawat terbang, yacht.
- Barang mewah lainnya: tas, sepatu, arloji, berlian.

Lower rate: 5% atau 7%

- Barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak:
- Barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga yang merupakan konsumsi paling besar masyarakat, dijaga agar harganya tetap terjangkau sehingga dikenai tarif 5%.
- Jasa tertentu (misalnya: pendidikan dan angkutan penumpang) dikenai tarif 7% untuk menjaga jasa agar tetap berkualitas dan terjangkau.

Final rate: 1%

- PPN Final bagi pengusaha tertentu atau kegiatan tertentu. Contoh:
- PKP dengan peredaran usaha tertentu, misalnya PKP dengan peredaran usaha maksimal Rp1,8 miliar cukup setor 1% dari peredaran usahanya.
- PKP dengan kegiatan usaha tertentu, misalnya pengusaha produk pertanian, cukup setor 1% karena tidak memiliki pajak masukan.

Ketentuan Saat ini Ekspor: 0%

Usulan Pengaturan Ekspor: 0%

Bisnis/Adi Pramono

Sumber: Kementerian Keuangan, RUU KUP

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Anak Muda di Antara Lumpur dan Keringat

Jawa Barat membutuhkan generasi petani baru. Jumlah petani muda kurang dari 30%.

KRISTIADI

kristiadi@mediaindonesia.com

JAWA Barat masih menjadi daerah penghasil beras ketiga terbesar di Tanah Air. Daerah itu hanya kalah selangkah dari Jawa Timur yang berada di puncak dan Jawa Tengah di nomor dua.

Tahun ini, dari Januari hingga April, sawah-sawah di Jawa Barat masih menghasilkan 3,79 juta ton padi. Namun, bagi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, persoalan di daerah yang mereka pimpin itu, bukan sekadar produksi pertanian.

"Generasi muda yang terjun ke bidang pertanian cenderung turun. Saat ini, petani di Jawa Barat didominasi mereka yang berusia di atas 44 tahun," ujar Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. **M1.9**

Mengutip data Badan Pusat Statistik pada 2018, jumlah petani di Jabar mencapai 3,2 juta orang. Petani berusia muda, antara 25-44 tahun ha-

nya 945 ribu atau 29%.

"Karena itu, kami sekarang berkonsentrasi mendorong tumbuhnya petani milenial. Sejumlah program sudah diluncurkan, di antaranya Santri Tani dan Petani Milenial," lanjutnya.

Selain pertanian, petani milenial juga diarahkan untuk menekuni sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kemarin, Uu meluncurkan rintisan usaha petani milenial di bidang perkebunan. Pembukaan dilakukan di Kabupaten Garut.

Dalam program Petani Milenial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan pelatihan dan membuka sumber permodalan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Hendy Jatnika menambahkan, petani milenial perkebunan fokus pada komoditas kopi, gula aren, vanili, perbenihan, dan limbah kelapa. "Pada tahap awal ini ada 25 petani milenial yang lolos."

Kebun sawit

Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi berkonsentrasi mengembangkan konsep pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Upaya itu dilakukan dengan pengembangan sawit swadaya menggunakan pendekatan teknologi.

Dinas Perkebunan Kalsel sudah merangkul Universitas Lambung Mangkurat dan Institut Pertanian Bogor. "Kami menyiapkan langkah strategis, mulai peningkatan SDM perkebunan hingga diversifikasi kebun sawit dengan komoditas lain," ungkap Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.

Menurut dia, Kalsel sangat fokus menggarap perkebunan kelapa sawit karena punya peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional.

Kepala Dinas Perkebunan Suparmi menambahkan, pendekatan teknologi akan sangat mendukung langkah strategis pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di era 4.0. "Dukungan dari aplikasi, dengan

keterbukaan informasi bisa membantu Pemprov menyusun kebijakan guna meningkatkan produktivitas sawit."

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, Iskandar, meminta pembukaan konektivitas yang lebih lebar untuk menuju lokasi lumbung pangan baru di wilayahnya. "Konektivitas dibutuhkan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan perekonomian wilayah meningkat."

Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka akses yang lebih luas. "Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," tandasnya.

Di Jawa Timur, Dinas Pertanian mengantisipasi turunnya harga umbi porang. "Langkah kami adalah mengatur kembali jadwal panen atau menundanya sehingga keuntungan dan hasil bagi petani menjadi lebih besar," ungkap Kepala Dinas Pertanian Hadi Sulistyono. (DY/DW/FL/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Inovasi Pertanian di Persimpangan

FADJRY DJUFRY, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Integrasi Balitbang Pertanian ke BRIN, dikhawatirkan melahirkan stagnasi dalam penyediaan dukungan teknologi pertanian.

Pada 26 Agustus 2021, Badan Litbang (Balitbang) Pertanian mencapai usia 47 tahun. Kalau manusia, pada usia seperti itu masuk kelompok setengah baya dan berada pada puncak masa produktif dalam berkarya. Semoga demikian juga dengan Balitbang Pertanian.

Balitbang Pertanian menopang peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain dalam penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, beragam, dan aman bagi seluruh penduduk.

Secara khusus, peran tersebut dapat dilihat pada masa pandemi Covid-19. Sebagian besar sektor mengalami penurunan, tetapi sektor pertanian masih mampu tumbuh positif.

Untuk menjalankan peran tersebut, sektor pertanian harus tumbuh cepat dan berkualitas. Maka itu, kendala terkait keterbatasan dan kendala sumber daya, terutama lahan untuk perluasan kapasitas produksi dan risiko gangguan produksi harus segera diatasi. Antara lain, melalui penyediaan dan penerapan teknologi pertanian. Ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas dan daya saing produk, efisiensi usaha, serta pendapatan petani.

Penyediaan dan penerapan teknologi pertanian inovatif perlu berdekatan dengan pengguna utama, yaitu direktorat jenderal (ditjen) teknis sebagai pembina teknis pembangunan pertanian di lapangan dan para

petani.

Produksi pangan pokok dan penting sebagian besar dihasilkan sekitar 27,7 juta petani dan kebanyakan skala kecil (luas garapan <0,5 ha) yang memiliki kemampuan terbatas, untuk memasok (terutama beras) bagi lebih dari 270 juta penduduk. R-5

Itu hanya dimungkinkan berkat dukungan teknologi inovatif. Proses bisnis hilirisasi teknologi kepada pengguna, terutama bagi petani kecil, dilakukan dengan pendekatan keterkaitan antara penelitian dan penyuluhan yang intensif atau *research-extension linkages*.

Hingga 2018, Balitbang Pertanian menghasilkan lebih dari 600 teknologi inovatif unggul yang sebagian besar dimanfaatkan dan berkembang di berbagai subsektor, mendukung program strategis pertanian, seperti *food estate*, pertanian presisi.

Ada sejumlah kontribusi Balitbang Pertanian selama ini, di antaranya, pertama, ketahanan pangan. Berbagai varietas unggul baru (VUB) padi dengan potensi hasil 5,4-12,1 ton/hektare (ha) dari 308 VUB, yang dihasilkan berperan meningkatkan produksi beras.

Paling monumental VUB Ciherang, Mekongga, dan berbagai VUB kelompok Inpari, menggantikan kelompok IR hasil IRRI sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Penggunaan VUB itu meningkatkan produktivitas padi 10-20 persen dibandingkan VUB sebelumnya, menghasilkan keuntungan ekonomi sekitar Rp 16,56 triliun per tahun, belum termasuk keuntungan akibat interaksinya dengan teknologi dan inovasi lain.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEC

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/0/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kedua, hortikultura. Riset hortikultura menghasilkan dan mengembangkan berbagai teknologi unggul tanaman sayuran, buah tropika, jeruk, dan buah subtropika, serta tanaman hias.

Untuk tanaman jeruk, teknologi paling unggul, antara lain teknologi benih jeruk bebas penyakit yang tersebar di hampir seluruh provinsi dengan bibit sekitar 18,89 juta batang setara Rp 188 miliar, dengan luas areal sekitar 47 ribu ha atau 83 persen dari total areal tanaman jeruk di seluruh Indonesia seluas 56 ribu ha.

Ketiga, perkebunan dan bioindustri. Perkebunan mempunyai andil besar dalam sistem perekonomian nasional. Terutama terkait dengan petani dan ketenagakerjaan, industri, dan perolehan devisa nonmigas.

Peran teknologi dan inovasi hasil Balitbang Pertanian juga sangat menonjol mulai dari produksi hingga pengolahan hasil. Selain berbagai teknologi budi daya seperti varietas atau klon, akhir-akhir ini riset perkebunan menghasilkan berbagai teknologi modern.

Sebut saja pupuk hayati, seperti nanobio-pestisida, pestisida nabati, reaktor biodiesel dengan Biodiesel B100 yang sarat dampak. Varietas unggul tanaman tebu, seperti AAS-Agribun potensial meningkatkan pendapatan petani Rp 14 juta- Rp 28 juta/ha.

Keempat, peternakan. Selain ayam ras, ayam lokal juga berperan besar (12 persen) dalam penyediaan daging ayam dan pendapatan peternak.

Balibangtan menghasilkan empat varietas/galur ayam kampung unggul petelur dan pedaging, seperti ayam KUB-1, ayam Sensi-1 agrinak, ayam Gaosi-1 Agrinak, ayam KUB-2 "Janaka" Agrinak, dan ayam KUB-2 "Narayana" Agrinak.

Integrasi ke BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyikapi amanat UU No 11 Tahun 2019 dengan melakukan "integrasi" empat LPNK dan 48 lembaga litbang kementerian/lembaga (K/L). Integrasi ini bukan hanya kelembagaan, melainkan termasuk SDM, aset, program, dan anggaran.

Secara operasional, integrasi mungkin bisa dilakukan untuk beberapa litbang K/L yang relatif kecil. Namun, akan berbeda proses dan dampaknya bagi litbang K/L besar

seperti Balitbang Pertanian.

Ada beberapa potensi dampak yang perlu dipertimbangkan dari kebijakan integrasi tersebut. Pertama, dikhawatirkan melahirkan stagnasi dalam penyediaan dukungan teknologi pertanian dan kebijakan yang dibutuhkan Kementerian Pertanian.

Sistem inovasi pertanian selama ini memastikan produk inovasi tersedia dan dapat segera digunakan petani dan stakeholder lain.

Untuk merespons kebutuhan K/L, BRIN memang merumuskan mekanisme kerja sama, dengan K/L melalui skema penugasan atau kegiatan bersama. Namun, ini menimbulkan hambatan birokrasi baru yang dikhawatirkan tak bisa dengan cepat merespons kebutuhan K/L.

Pada akhirnya, membawa konsekuensi lebih jauh pada penurunan produksi pertanian, terutama pangan. Apalagi, dalam kondisi masih berhadapan dengan pandemi Covid-19, hambatan-hambatan seperti ini sebaiknya dapat dihindari.

Kedua, dampak yang dikhawatirkan cukup serius adalah terhadap aspek SDM, terutama peneliti. Berbagai dampak terhadap degradasi kuantitas dan kualitas SDM riset yang perlu diantisipasi, di antaranya ada peneliti yang harus alih jabatan ke fungsional lain.

BRIN kemungkinan menetapkan persyaratan untuk peneliti K/L yang bisa bergabung, kemungkinan ada keharusan mengikuti uji kompetensi bagi peneliti yang bergabung ke BRIN setelah menyelesaikan tugas sebagai pejabat struktural.

Dampak lainnya, keterbatasan formasi jabatan fungsional di setiap organisasi riset dan pusat penelitian tertentu.

Opsi integrasi

Sejalan dengan amanah UU No 11 Tahun 2019, sebaiknya kita mempertimbangkan rekomendasi hasil kajian *Knowledge Sector Initiative* (KSI) bahwa BRIN sebaiknya lebih menempuh strategi *soft integration* ketimbang *structural integration*.

Dengan model *soft integration*, kelembagaan litbang berikut SDM dan asetnya tetap melekat di K/L terkait, tetapi program dan anggaran dikoordinasikan oleh BRIN.

Model ini mirip skema Prioritas Riset

Nasional (PRN) yang digagas Kemenristek, melibatkan banyak K/L dan masih berlanjut sampai saat ini. Penyempurnaan skema ini tentu perlu dilakukan terus berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam.

Dengan skema ini, kebutuhan K/L yang spesifik masih bisa direspons dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. ■

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUMBER

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

KELEMBAGAAN PEMERINTAH

Jangan Kerdilkan Badan Pangan

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebenarnya mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan paling lambat tiga tahun sejak undang-undang itu diundangkan pada 12 November 2012. Artinya, lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden itu semestinya sudah terbentuk sebelum November 2015.

Akan tetapi, baru pada 29 Juli 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Hampir sembilan tahun sejak undang-undang itu diundangkan, enam tahun sejak tenggat, dan kurang dari 30 hari sejak Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada 5 Juli 2021 meminta pemerintah membentuk lembaga tersebut.

Terlepas dari jeda waktu yang begitu panjang, tidak sedikit pihak yang menumpukan harapan pada lembaga ini. Betapa tidak, problem yang dihadapi sektor pangan dan pertanian nasional teramat kompleks. Ada tumpang-tindih aturan, kewenangan antarkementerian/lembaga dan pusat/daerah, serta kepentingan lintas sektor yang melingkupinya.

Selain itu, ada masalah terkait pengelolaan cadangan pangan nasional, stabilitas stok, dan harga komoditas yang berpengaruh besar pada kehidupan jutaan petani, peternak, pembudidaya ikan, pekebun, dan nelayan di Tanah Air. Ada pula problem mendasar, yakni soal akurasi data produksi dan neraca pangan yang belum terselesaikan. Isu kualitas, mutu, dan keamanan pangan juga masih menjadi persoalan.

Kehadiran lembaga ini sudah sejak lama diidamkan dapat menyelesaikan segenap persoalan itu. Dengan kelembagaan yang ko-

koh dan kewenangan yang luas, Badan Pangan Nasional diharapkan lebih ampuh menyelesaikan masalah pangan secara integral, dari hulu hingga ke hilir. Dengan pendekatan yang komprehensif, penyelesaian masalah oleh lembaga yang *powerful* diharapkan lebih efektif.

Setidaknya, sejumlah masalah yang berulang, seperti soal perbedaan data, sudut pandang, dan tarik ulur kepentingan sektoral, bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Selama ini, publik kerap dibikin bingung karena ketidaksinkronan kebijakan dan perbedaan sikap antarkementerian atau lembaga. Soal impor garam, misalnya, ada perbedaan antara sektor perikanan dan kelautan dengan perindustrian atau antara petambak garam rakyat dan pelaku industri makanan dan minuman. Sementara terkait impor gula, beras, dan daging, ada perbedaan sikap dan pandangan antara pelaku usaha dan pemangku di sektor perkebunan atau pertanian dengan perindustrian atau perdagangan.

Menyempit

Sesuai Pasal 126 UU No 18/2012, lembaga pemerintah di bidang pangan dibentuk untuk mewujudkan tujuan yang ideal, yakni kedua-



HERYUNANTO

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Utang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

latan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Penyelenggaraan kebijakan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi; serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

UU No 18/2012 juga mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perairan. Cakupannya luas dan beragam. Namun, Perpres No 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional hanya membatasi jenis pangan pada sembilan komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Selain itu, orientasi kebijakan lembaga ini dikhawatirkan berfokus pada ketahanan pangan, lalu mengabaikan aspek kedaulatan dan kemandirian sebagaimana amanat UU No 18/2012. Apalagi, Perpres No 66/2021 mengacu pada UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.

UU No 11/2020 mengubah dan menghapus norma yang sangat berharga bagi petani dan produsen pangan dalam negeri dalam UU No

18/2012, yakni prioritas produksi domestik sebagai sumber pangan. Regulasi "sapu jagat" ini merevisi ketentuan umum tentang ketersediaan pangan dengan memosisikan pangan impor sebagai sumber

yang setara dengan produksi dalam negeri.

UU Cipta Kerja juga menganulir pasal-pasal pelindung produsen pangan dalam negeri dalam sejumlah UU, terutama terkait syarat dan ketentuan impor yang

menjadi semakin longgar. Di sektor peternakan, misalnya, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan UU No 14/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mensyaratkan impor ternak dan produk hewan bisa ditempuh jika produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Syarat pemasukan ternak dalam wujud bakalan pun diubah tanpa syarat sehingga cakupan impor jadi lebih luas.

Dengan demikian, selain terlambat dari sisi waktu, pembentukan Badan Pangan Nasional berpotensi menjadi sia-sia seiring perubahan undang-undang yang menjadi acuannya. Cakupan tugas, fungsi, dan visinya tereduksi dari cita-cita semula, yakni sebagai lembaga yang kuat untuk menghadapi problem kusut sektor pertanian.

Padahal, ada sederet pekerjaan rumah krusial yang mesti diselesaikan pemerintah terkait stagnasi dan kemunduran sektor pertanian, antara lain tecermin dari produktivitasnya yang belum optimal, usia petani yang makin tua, defisit neraca perdagangan pangan, serta kesejahteraan petani yang tidak beranjak. Keberadaan lembaga yang kuat diantarkan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jangan kerdilkan badan pangan.

(MUKHAMAD KURNIAWAN)

2

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 17/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sistem Resi Gudang sebagai Sumber Pembiayaan Petani



INDRA SETIAWAN

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Akses terhadap pembiayaan untuk kegiatan pertanian merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi petani Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan hanya 15% petani Indonesia yang memiliki akses pada pembiayaan formal, hal yang penting dan diperlukan untuk kelangsungan produksi pertanian dan peningkatan produktivitasnya.

Persyaratan kredit lembaga pembiayaan, termasuk bank, yang menuntut agunan seperti sertifikat tanah, merupakan salah satu penyebab terbatasnya akses petani terhadap pembiayaan. International Finance Cooperation (IFC) menyebutkan bahwa sekitar 90% petani yang tergolong ke dalam petani kecil, yang luas lahannya kurang dari dua hektare, tidak memiliki sertifikat tanah. Ke-

nyataan ini menunjukkan perlunya instrumen lain yang dapat dijadikan agunan oleh petani Indonesia. 5.4

Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan petani, adalah melalui mekanisme Sistem Resi Gudang (SRG). Undang-Undang (UU) Nomor 6/2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah oleh UU Nomor 9/2011 menetapkan bahwa Resi Gudang yang diterima petani ketika menyimpan hasil panennya di suatu gudang, baik milik pemerintah atau swasta, dapat dijadikan agunan.

Dalam peraturan ini, ditentukan 10 komoditas yang dapat disimpan yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam dengan persyaratan mutunya masing-masing. Dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, petani pada umumnya dapat memperoleh pinjaman hingga 70% dari nilai resi gudang. Pemerintah juga menawarkan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) yang memberikan bunga rendah kepada petani yaitu 6% per tahun.

Kegiatan yang berkaitan dengan sistem resi gudang berada di bawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI) yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan sistem ini.

Menurut BAPPEBTI, terdapat 3.396 resi gudang yang diterbitkan hingga 2019 dengan nilai sebesar Rp 731,65 miliar. Selain sebagai jaminan pembiayaan, Sistem Resi Gudang juga memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panennya untuk dijual kembali ketika harga dianggap menguntungkan atau disebut tunda jual. Secara tidak langsung, skema ini juga mengasah kemampuan kewirausahaan petani dalam menentukan waktu jual yang tepat untuk memperoleh keuntungan tertinggi.

Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa petani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang memanfaatkan SRG berhasil memperoleh peningkatan harga sebesar Rp400 - Rp600 bagi Gabah Kering Gilingnya.

Meski SRG mampu memberikan manfaat bagi petani, pelaksanaannya masih sangat terbatas. Walaupun diperkenalkan sejak 2006, pelaksanaannya masih cenderung berjalan lambat karena kurangnya infrastruktur, peralatan penyimpanan, sosialisasi dan juga masih terbatasnya jumlah lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit SRG.

Laporan BAPPEBTI menyebutkan bahwa dari 123 gudang SRG pemerintah, hanya 35 yang aktif, 58 tidak beroperasi lagi dan 30 belum pernah aktif. Kurangnya infrastruktur men-

jadi salah satu kendala dalam menerapkan SRG. Selain sedikitnya gudang yang beroperasi, tidak semua gudang dilengkapi dengan alat-alat yang mampu menjaga kualitas hasil panen, seperti mesin pengering.

Walaupun komoditas yang masuk ke gudang harus memenuhi standar tertentu agar kualitas dan nilainya tetap sama saat pertama kali masuk dan ketika dikeluarkan dari gudang, ketiadaan alat-alat penunjang juga dapat berpengaruh kepada terjaganya mutu komoditas yang disimpan. Mutu komoditas jelas akan memengaruhi harga jualnya.

Laporan Bank Indonesia mengatakan lokasi SRG juga seringkali jauh dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu perusahaan, koperasi, atau institusi pemerintahan yang berfungsi untuk melakukan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian barang, gudang, dan pengelola gudang. Tidak semua wilayah di mana gudang berada mempunyai petugas mutu yang penting untuk memastikan bahwa mutu komoditas yang disimpan dapat terjaga dengan baik.

Jumlah gudang yang sedikit juga mengurangi minat petani mengikuti skema pembiayaan ini karena harus menanggung ongkos transportasi yang tinggi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 1/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

untuk mengangkut hasil panen dari sawah ke gudang yang jauh. Penelitian Gunawan (2019) menemukan bahwa semakin dekat lokasi gudang, semakin tinggi kesediaan petani untuk memanfaatkan sistem resi gudang.

Lambatnya implementasi juga ditandai dengan masih sedikitnya jumlah institusi keuangan yang menyediakan pembiayaan dengan resi gudang karena secara umum, masih banyak skema pembiayaan yang lain yang lebih menguntungkan bagi bank. Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia memperlihatkan bahwa hanya ada 40 institusi yang memberikan layanan ini.

Permasalahan terakhir adalah kurangnya sosialisasi mengenai sistem resi gudang kepada petani. Selama ini, sosialisasi juga dititikberatkan pada mekanisme pendaftaran resi gudang dan bukan pada manfaat yang diterima petani, hingga tidak mendorong petani untuk menggunakan sistem resi gudang.

Rekomendasi

Pembiayaan pertanian dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan tidak akan berjalan efektif apabila permasalahan-permasalahan diatas tidak diatasi. Pemerintah melalui BAPPEBTI yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, perlu secara bertahap mengaktifkan gudang-gudang

yang tidak aktif dan yang belum pernah dioperasikan.

Kerjasama juga diperlukan dengan kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, untuk menyediakan alat-alat penunjang di gudang penyimpanan. Selain itu, perlu adanya perluasan jaringan Lembaga Penguji Komoditi di wilayah-wilayah yang menerapkan sistem resi gudang.

BAPPEBTI juga disarankan untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menarik minat lembaga-lembaga keuangan untuk ikut menyediakan kredit resi gudang dan dengan demikian memberikan petani lebih banyak pilihan sumber kredit.

Terakhir, BAPPEBTI perlu menggandeng Kementerian Pertanian untuk memperkuat usaha-usaha sosialisasi SRG gudang terhadap petani melalui penyuluh pertanian ataupun fasilitator pembiayaan petani swadaya.

Pola sosialisasi kepada petani juga perlu diubah. Sosialisasi tidak cukup hanya mendorong petani untuk mendaftar, tapi juga perlu memperkenalkan program ini dan menunjukkan manfaat yang akan didapatkan petani dari SRG terhadap kelangsungan kegiatan pertanian mereka. ☐